

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA
MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN
METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA
PERKAPALAN**



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Terapan Pelayaran

Disusun Oleh:

AHMAD GUNAWAN
NIT. 50135078. K

**PROGRAM STUDI KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

2017

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA
MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN
METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA
PERKAPALAN**



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Terapan Pelayaran

Disusun Oleh:

AHMAD GUNAWAN
NIT. 50135078. K

**PROGRAM STUDI KALK DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA
MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN METODE
PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN**

Oleh:

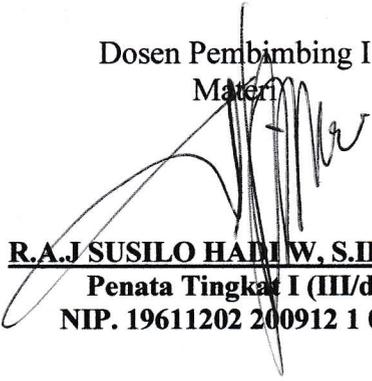
AHMAD GUNAWAN
NIT. 50135078 K

Telah disetujui dan diterima selanjutnya dapat diujikan di depan

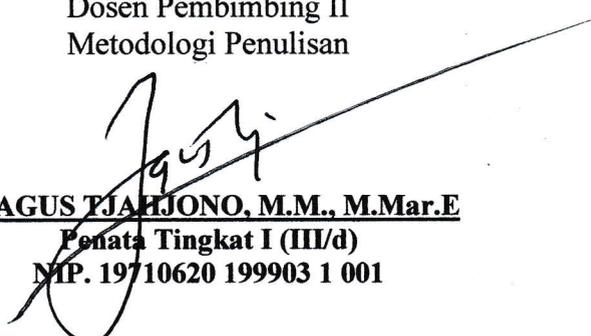
Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang, Juli 2017

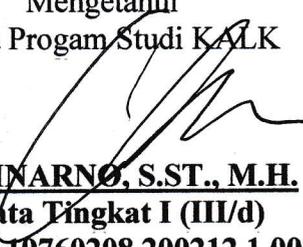
Dosen Pembimbing I
Materi


R.A.J SUSILO HADI W, S.IP., M.M
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19611202 200912 1 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi Penulisan


A.AGUS TJAHOJONO, M.M., M.Mar.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710620 199903 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi KALK


Dr. WINARNO, S.ST., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760208 200212 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN

Disusun Oleh:

AHMAD GUNAWAN

NIT. 50135078 K

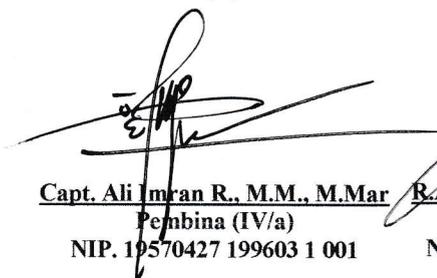
Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran

Serta dinyatakan lulus dengan nilai

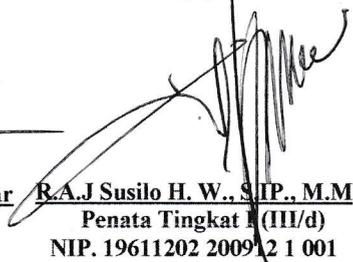
Pada tanggal,

Penguji I



Capt. Ali Imran R., M.M., M.Mar
Pembina (IV/a)
NIP. 19570427 199603 1 001

Penguji II



R.A.J Susilo H. W., SIP., M.M
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19611202 200912 1 001

Penguji III



Capt. Sidrotul M, M.Si., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 19670712 199808 1 001

Dikukuhkan Oleh :

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. Marihot Simanjuntak, M.M

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661110 199803 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD GUNAWAN

NIT : 50135078. K

Jurusan : KALK

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul “Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan di Atas Kapal Dengan Metode Pemilihan Langsung di PT. Pertamina Perkapalan” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan Skripsi dari orang lain, dan saya bertanggung jawab atas judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana suatu hari terbukti merupakan jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia untuk membuat Skripsi dengan judul baru atau bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, Juli 2017

Yang menyatakan,



AHMAD GUNAWAN

NIT. 50135078 K

MOTTO

1. *“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” (HR, Turmudzi)*
2. *Bersyukur karena nikmat apapun hidup jika tanpa ada rasa syukur terasa hidup selalu kurang nikmat.*
3. *Hidup bukan mengikuti arus, karena hanya sampah dan ikan mati yang hanya mengikuti arus.*
4. *Bekerja keras dengan selalu membawa tuhan di setiap langkah kegiatan dan percaya hasil tidak mengkhianati usaha.*
5. *Sekeras apapun hidupmu sesulit apapun masalahmu masih banyak hidup-hidup yang lebih keras dan masalah-masalah yang lebih sulit di luar sana.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu dalam pelaksanaan penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayahhanda Caryani dan Ibunda Musriyah atas segala do'a, harapan, semangat, serta kasih sayangnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kakak-kakaku dan Adik yang kucintai dan kubanggakan selalu (M. Riki Rifain, A. Rifandi, Ayu Wulan Sari)) atas dukungan dan doa yang tulus yang kalian berikan.
3. Seluruh saudara-saudaraku keluarga "Siwalan Baik" yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan do'a hingga pendidikan ini dapat terselesaikan, dan Tahta Alfiana Izzy yang memberikan motivasi dan semangat setiap saat.
4. Untuk seluruh karyawan/staff PT. Pertamina Perkapalan yang memberikan ilmu yang bermanfaat semoga kelak saya dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab setelah lulus dari PIP Semarang.
5. Teman-Teman Kelas *Port and Shipping Bravo* angkatan 50, atas kekompakan dan kebersamaan selama menjadi teman kelas.
6. Seluruh keluarga besar Taruna angkatan 50, semoga kekeluargaan dan persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun.

7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan di atas Kapal Dengan Metode Pemilihan Langsung di PT. Pertamina Perkapalan”.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Profesional Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) dalam bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepeleabuhanan Program D.IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi pembaca karena peneliti berusaha menyusun Skripsi ini sebaik mungkin dengan keadaan yang sebenar-benarnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Dr. Winarno, S.ST., M.H., selaku Ketua Progam Studi KALK.
3. Bapak R.A.J Susilo Hadi Wibowo, S.IP., M.M selaku Dosen Pembimbing Materi.

4. Bapak A.Agus Tjahjono, M.M., M.Mar.E selaku Dosen Pembimbing Metodologi dan penulisan dalam skripsi ini.
5. Seluruh Jajaran Dosen, Staff dan Karyawan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Yang terhormat PT. Pertamina Perkapalan yang telah memberikan kesempatan melaksanakan Prada (Praktek Darat).
7. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang,2017

Penulis

AHMAD GUNAWAN
NIT. 50135078 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pikir Penelitian.....	22
C. Definisi Operasional.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
B. Metode Penelitian	28
C. Sumber Data	30
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum perusahaan	35
B. Analisis Penelitian	41
C. Pembahasan Masalah	43
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	40
Gambar 4.2 Alur Pengadaan Barang dan Jasa	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Siupal Perusahaan	63
Lampiran 2 : Hasil Wawancara Responden dengan Narasumber.....	64
Lampiran 3 : Daftar Nama Kapal PT. Pertamina Perkapalan 2016.....	72
Lampiran 4 : <i>Action Plan</i> dan Lembar Perbaikan.....	74

ABSTRAK

Ahmad Gunawan, 50135078 K, 2017, “*Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan di Atas Kapal Dengan Metode Pemilihan Langsung di PT. Pertamina Perkapalan*”, Program Diploma IV, Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,
Pembimbing: (I) R.A.J Susilo Hadi Wibowo, S.IP., M.M, Pembimbing (II) A.Agus Tjahjono, MM., M.Mar.E.

Kegiatan pengiriman minyak oleh armada kapal PT. Pertamina Perkapalan yang cukup padat memerlukan perawatan mesin yang teratur agar operasi pengiriman minyak tidak terhambat. Kewajiban perusahaan untuk menunjang perawatan kapal harus menyediakan *sparepart* dan jasa perbaikan kapal untuk menunjang kebutuhan di atas kapal. Perusahaan membentuk divisi dalam struktur organisasinya yang bertanggungjawab mengurus segala pengadaan barang dan jasa kapal yaitu divisi *Technical Fleet 3*.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pemilihan langsung untuk kelancaran pengoperasian armada kapal PT. Pertamina Perkapalan dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina Perkapalan dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah deskriptif dan kualitatif. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa kata-kata yang bersumber dari observasi langsung penulis.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Darat di PT. Pertamina Perkapalan, *Devisi Technical Fleet 3* berperan sebagai pengadaan barang/*sparepart* dan jasa yang di butuhkan kapal dalam menunjang kelancaran kegiatan pengiriman minyak oleh armada kapal PT. Pertamina Perkapalan masih mempunyai kekurangan diantaranya kurangnya jumlah staff operasional yang mengakibatkan adanya rangkap kerja, masih adanya pekerjaan yang diluar dari *plan*, kurang koordinasinya antara *estimator* dengan penyedia barang/jasa, dan dalam pelaksanaan pengadaan masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden no. 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan hambatan untuk proses tersebut. Dengan mengatasi masalah tersebut diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pemilihan langsung dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan tidak mengalami kerugian yang disebabkan terganggunya pengoperasian kapal, pada bagian akhir skripsi penulis menyajikan kesimpulan dan saran.

Kata kunci: *Technical Fleet 3*, pengadaan barang dan jasa, *plan*.

ABSTRACT

Ahmad Gunawan, 50135078 K, 2017, *"Implementation Procurement of Goods and Services to Meet the Needs on the Ship With Direct Selection Method at PT. Pertamina Shipping "*, Diploma Program IV, Mini Thesis of Port and Shipping Department, Merchant Marine Polytechnic Semarang, Advisor: (I) R.A.J Susilo Hadi Wibowo, S.IP., M.M, Advisor (II) A.Agus Tjahjono, MM., M.Mar.E.

Oil delivery activities by fleet of PT. Pertamina Shipping is quite dense require regular machine maintenance for oil delivery operations are not hampered. Responsibility companies to support the maintenance of the ship must provide spare parts and ship repair services to support the needs on board. The Company established a division within its organizational structure responsible for the maintenance of all ship procurement and goods, namely Technical Fleet 3 division.

In this research the researchers explain about the procurement of goods and services by using direct selection method for the smooth operation of the fleet of PT. Pertamina Shipping and constraints faced and efforts made by PT. Pertamina Shipping in procurement of goods and services by direct selection method. The method used in the writing of this thesis is descriptive and qualitative. The data collected by the researchers in the form of words derived from the researchers direct observation.

The results of research conducted during the researchers do Land Practiced in PT. Pertamina Shipping, Technical Fleet 3 Division serves as the procurement of good /spare parts and services needed by the ship in supporting the smoothness of the shipping activities of oil by the fleet of PT. Pertamina Shipping still have shortcomings such as lack of operational staff which resulted from duplication, there is still work outside of plan, lack of coordination between estimator and provider of goods/services, and in procurement implementation still exist that is not in accordance with Presidential Regulation no. 54 of 2010 on procurement of goods and services resulting in obstacles to the process. By overcoming the problem, it is expected that the process of procurement of goods and services by using the direct selection method can run smoothly and the company does not experience losses caused by disruption of the operation of the ship, at the end of the researchers thesis presents the conclusions and suggestions.

Keywords: Technical Fleet 3, procurement of goods and services, plan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan dalam rancangan kerja untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna barang maupun jasa. Pengadaan barang dan jasa atau sering dikenal *procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, 2012:2). Proses ini digunakan untuk memastikan pembeli menerima barang, jasa atau karya dengan harga terbaik yang mungkin, ketika aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi dibandingkan. Korporasi dan badan-badan publik sering mendefinisikan proses dimaksudkan untuk mempromosikan kompetisi yang adil dan terbuka untuk bisnis mereka dan meminimalkan risiko, seperti paparan penipuan dan kolusi. Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, hingga diterimanya barang dan jasa oleh pengguna. Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang atau benda yang dibutuhkan.

PT. Pertamina Perkapalan Jakarta merupakan perusahaan pelayaran transportasi laut, khususnya untuk jasa pelayaran kapal minyak yang berlokasi strategis beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 32– 34, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam beroperasinya kapal sebagai salah satu alat transportasi akan melalui berbagai macam kondisi yang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor usia kapal. Hal ini dapat mengakibatkan kapal mengalami kerusakan pada konstruksinya maupun peralatannya sebagai item pendukung dalam beroperasi. Pada saat Penulis melaksanakan Praktek Darat, hampir setiap bulan terdapat laporan kerusakan kapal yang bersifat *urgent* saat kapal sedang berlayar, khususnya untuk kerusakan permesinan dan membutuhkan *spare part*.

Untuk menstabilkan kondisi kapal agar dalam kinerjanya tetap dalam kondisi baik, maka perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara rutin. Hal ini menimbulkan permintaan pengadaan barang ataupun jasa perbaikan kapal dalam bentuk *action plan* yang dibuat pihak kapal. Dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan kapal, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta memiliki divisi khusus untuk menangani dan memenuhi permintaan kebutuhan barang dan jasa saat dilakukan perawatan dan perbaikan, salah satunya yaitu divisi *Technical Fleet 3/TF 3*. Dalam kinerjanya divisi TF3 memiliki tugas sebagai tempat proses pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang/jasa di PT. Pertamina Perkapalan sendiri dapat dilaksanakan dengan beberapa cara/metode, yaitu dengan metode

lelang/pelelangan, metode pemilihan langsung/tunjuk langsung, serta dengan metode swakelola. Pengertian dari metode lelang/pelelangan sendiri adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Metode yang kedua adalah metode pemilihan langsung/tunjuk langsung atau dengan cara tidak melalui pelelangan, metode penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung penyedia barang/jasa. Serta metode yang ketiga adalah metode swakelola yang artinya pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. Dari ketiga metode pengadaan barang/jasa di PT. Pertamina Perkapalan tersebut yang sering digunakan adalah metode pemilihan langsung/tunjuk langsung.

Proses pengadaan barang dan jasa yang cukup rumit dan panjang mengakibatkan pengurusan dokumen tidak dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu karena setiap pengurusan dokumen tidak berada di satu tempat/PC (*Personal Computer*) yang sama sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kelancaran kinerja kapal

di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta karena keterlambatan pengiriman atau pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kapal.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan di atas Kapal dengan Metode Pemilihan Langsung di PT. Pertamina Perkapalan”

B. Perumusan Masalah

Dalam Penulisan ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, sebab perumusan masalah akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan mencari jawaban yang lebih akurat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung guna memenuhi kebutuhan di atas kapal di PT. Pertamina Perkapalan?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh PT. Pertamina Perkapalan dalam memperlancar proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Penulis selama melaksanakan Praktek Darat, maka tujuan dari Penulis Skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip yang sesuai dasar dan etika dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung guna memenuhi kebutuhan di atas kapal PT. Pertamina Perkapalan.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan PT. Pertamina Perkapalan dalam memperlancar proses pengadaan barang dan jasa dengan pemilihan langsung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh dari hasil Penulisan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis
 - a) Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh Penulis selama belajar guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dengan sebutan Sarjana Sains Ilmu Terapan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
 - b) Memberikan sumbangan pikiran pada Taruna-Taruni khususnya di bidang ilmu Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta dan menambah wawasan akan keadaan dunia kerja yang sesungguhnya

- c) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung untuk kelancaran operasi kapal di PT. Pertamina Perkapalan.

2. Bagi Perusahaan

- a) Skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi masalah tentang pengadaan barang dan jasa untuk kapal bagi perusahaan.
- b) Dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan manajemen dan sebagai bahan referensi memecahkan masalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta.

3. Bagi Akademi

Sebagai tambahan referensi bagi bacaan dan informasi khususnya bagi Taruna/Taruni Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) yang akan menyusun Skripsi dan sebagai data dokumentasi pada perpustakaan.

4. Bagi Taruna

- a) Dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa di perusahaan pelayaran di Indonesia.

b) Menjadi wacana umum di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

5. Bagi Pembaca

Dengan Penulisan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca dalam hal pengadaan barang dan jasa pada salah satu perusahaan pelayaran yang terdapat di Indonesia.

E. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memahami dan mendapatkan pandangan yang lebih jelas mengenai pokok permasalahan yang akan dihadapi dan dibahas, diperlukan adanya sistematika Penulisan dalam penyusunan Penulisan ini.

Sistematika Penulisannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagian awal Skripsi

Bagian ini berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstraksi.

2. Bagian utama

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan tentang latar belakang Penulisan, rumusan masalah, tujuan Penulisan, manfaat Penulisan serta sistematika Penulisan skripsi

Bab II Landasan teori

Dalam Bab ini berisi teori-teori yang mendasari permasalahan dalam Skripsi ini beserta uraian-uraiannya yang didapat pada saat Penulis melaksanakan penelitian.

Bab III Metode penelitian

Dalam Bab ini berisi tentang obyek penelitian, pendekatan penelitian variabel penelitian, metode pengumpulan data dan prosedur penelitian, dan metode penarikan kesimpulan.

Bab IV Analisis hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang pembahasan tentang perumusan masalah yang timbul. Data yang diambil dari lapangan berupa fakta dan sebagainya termasuk pengolahan data, digambarkan dalam deskripsi data. Bab ini juga berisi analisis data dengan mencari hubungan antara hal yang satu dengan yang lainnya, juga alternatif pemecahan masalah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini berisi dua pokok uraian yaitu kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

“Implementasi adalah sistem rekayasa” bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain ke dalam pemrograman (Nurdin dan Usman, 2002;70)

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut

dalam rangkaian sebab- akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Charles O.Jones ,1996: 265).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2. Pengadaan barang/jasa

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Cakupan kegiatan pengadaan meliputi perencanaan, proses pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan, penggunaan barang dan manajemen aset, dan tiga transaksi yaitu transaksi pembelian barang/jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang dan transaksi pengeluaran barang.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 yaitu:

a. Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

b. Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat yang sebesar-besarnya dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

c. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh

penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka

Berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa menerangkan sebagai berikut (Adrian Sutedi, 2009:13).

Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum dalam lingkungan strategis yang ada, maka beberapa kebijakan umum diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
- d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
- e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

- f. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
- g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

3. Metode pemilihan langsung

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 (31) yang berbunyi:

“Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa”.

Pengertian penunjukan langsung yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa penunjukan langsung yaitu cara pengadaan barang hanya dengan menunjuk satu penyedia barang/vendor saja atau dengan kata lain hanya dengan satu pihak.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 ayat (32) yang berbunyi pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Pengertian pengadaan langsung yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengadaan langsung yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan cara langsung menunjuk kepada penyedia barang/jasa tanpa adanya pelelangan/seleksi.

Dalam buku pengadaan barang/jasa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 yang berisi menjelaskan tentang penunjukan langsung yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu, dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus.
- b. Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- c. Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 39 juga membahas tentang pengadaan barang langsung yang berisi sebagai berikut:

- a. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan kebutuhan operasional, teknologi sederhana, resiko kecil, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.

- b. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

4. Manajemen perawatan kapal

Managemen adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan formal untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan (John D. Millet, 2014:2)

Sedangkan menurut George R. Terry (2014:2), menjelaskan bahwa managemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang yang menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai unsur pernyataan diatas, pada dasarnya dalam managemen terdapat unsur-unsur sekelompok orang, fasilitas yang diperlukan, tujuan yang sudah ditetapkan, dan usaha yang harus dilakukan.

Adapun menurut pengertian umum mengenai managemen dikenal empat fungsi managemen yaitu *planning* atau perencanaan,

organizing atau pengorganisasian, *actuating* atau pelaksanaan, dan *controlling* atau pengendalian

Dari uraian mengenai perawatan dan manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen perawatan kapal adalah mempertahankan dan menjaga tingkat kemerosotan kondisi kapal sedemikian rupa, agar kapal (termasuk semua mesin/alat/fasilitas yang ada) dapat dioperasikan setiap saat dibutuhkan.

5. Kapal milik

PT. Pertamina Perkapalan dalam menjalankan usahanya dengan mengoperasikan kapal milik. Kerusakan kapal milik Perseroan dapat menyebabkan munculnya biaya perbaikan dan potensi hilangnya pendapatan dari operasi terkait. Jika dalam pengoperasiannya terjadi kerusakan maka biaya perbaikan ditanggung perusahaan sendiri. Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13, Tahun 2012). Pendaftaran hak milik atas kapal wajib dilengkapi dengan bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik, nomor pokok wajib pajak, surat ukur, dan bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13, Tahun 2012 Pasal (5) ayat 1).

Dalam hal ini kapal dioperasikan sendiri, seluruh kebutuhan kapal menjadi tanggungjawab pemilik kapal. Jika disewakan, pemilik kapal tetap harus memenuhi persyaratan tertentu bagi kapalnya, dan mengontrol kepada penyewa agar kapal miliknya tetap dioperasikan dengan baik dan mempertahankan kapal laik laut. Perkembangan dan kemajuan dunia maritim yang semakin cepat, dengan persyaratan yang semakin tinggi, menyebabkan harga kapal niaga semakin tinggi.

6. Jenis-jenis perlengkapan kapal yang dibutuhkan

a. *Spare part*

Suku cadang atau sparepart adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi". Berdasarkan definisi diatas, suku cadang merupakan faktor utama yang menentukan jalannya proses produksi dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan suku cadang ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam serangkaian aktivitas perusahaan (Indrajit dan Djokopranoto, 2003).

Setiap *spare part* mempunyai fungsi tersendiri dan dapat terkait atau terpisah dengan *spare part* lainnya. Misal *strating motor* akan terpisah fungsi kerjanya dengan *alternator*, walaupun secara tidak langsung juga ada hubungannya, dimana *alternator* berfungsi untuk menghasilkan listrik untuk mengisi aki (*accu/batere*), sedangkan

starting motor berfungsi untuk menghidupkan *engine* dengan menggunakan listrik dari aki.

Secara umum *spare part* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *spare part* baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah dipakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
- 2) *spare part* bekas atau copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu dengan kondisi masih layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut masih dapat dipergunakan atau mempunyai umur pakai, dan tidak layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut sudah tidak dapat lagi dipakai walaupun dilakukan perbaikan atau rekondisi.

Pada kenyataan di lapangan, umumnya banyak pemakai yang lebih menyukai komponen/*spare part* yang masih apa adanya (*unrecondition*). Mengingat komponen tersebut masih apa adanya setelah dilepas/dicopot dari alat berat atau truk, jadi masih dapat diidentifikasi kondisi sebenarnya. Jika diperlukan perbaikan atau rekondisi maka pemakai lebih yakin atas jenis suku cadang akan dilakukan penggantian.

Sebenarnya penggunaan komponen bekas/copotan sudah lama dilakukan oleh pemakai alat berat di negara maju. Namun umumnya

di negara maju, komponen yang dijual sudah dilakukan rekondisi dan siap pakai, serta *distributor/supplier* juga berani memberikan jaminan atas komponen tersebut. Sedangkan di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini saja, banyak pemakai alat berat yang mencari komponen bekas/copotan. Mengingat harganya lebih murah dibandingkan membeli komponen baru. Serta kebutuhan akan komponen bekas atau copotan semakin besar setiap tahunnya, tetapi kebutuhan tersebut akan semakin tidak seimbang dengan komponen bekas/copotan yang tersedia. Kecenderungan pemilik alat berat dan truk berusaha untuk memperpanjang umur pakai unit tersebut, jauh melebihi umur pakai di negara maju.

Khusus pemakai yang belum berpengalaman dalam memakai komponen bekas/copotan, perlu lebih hati-hati sewaktu memeriksa komponen tersebut, khususnya komponen yang sulit untuk melihat bagian dalam secara keseluruhan. Hindari kesalahan pengamatan karena pada beberapa kejadian pihak penjual tidak mau komponen tersebut dikembalikan kalau sudah dibeli. Walaupun demikian bukan berarti bertransaksi atas komponen bekas/copotan sangat beresiko, hanya dibutuhkan ketelitian dalam pengamatan sebelum memutuskan untuk membeli.

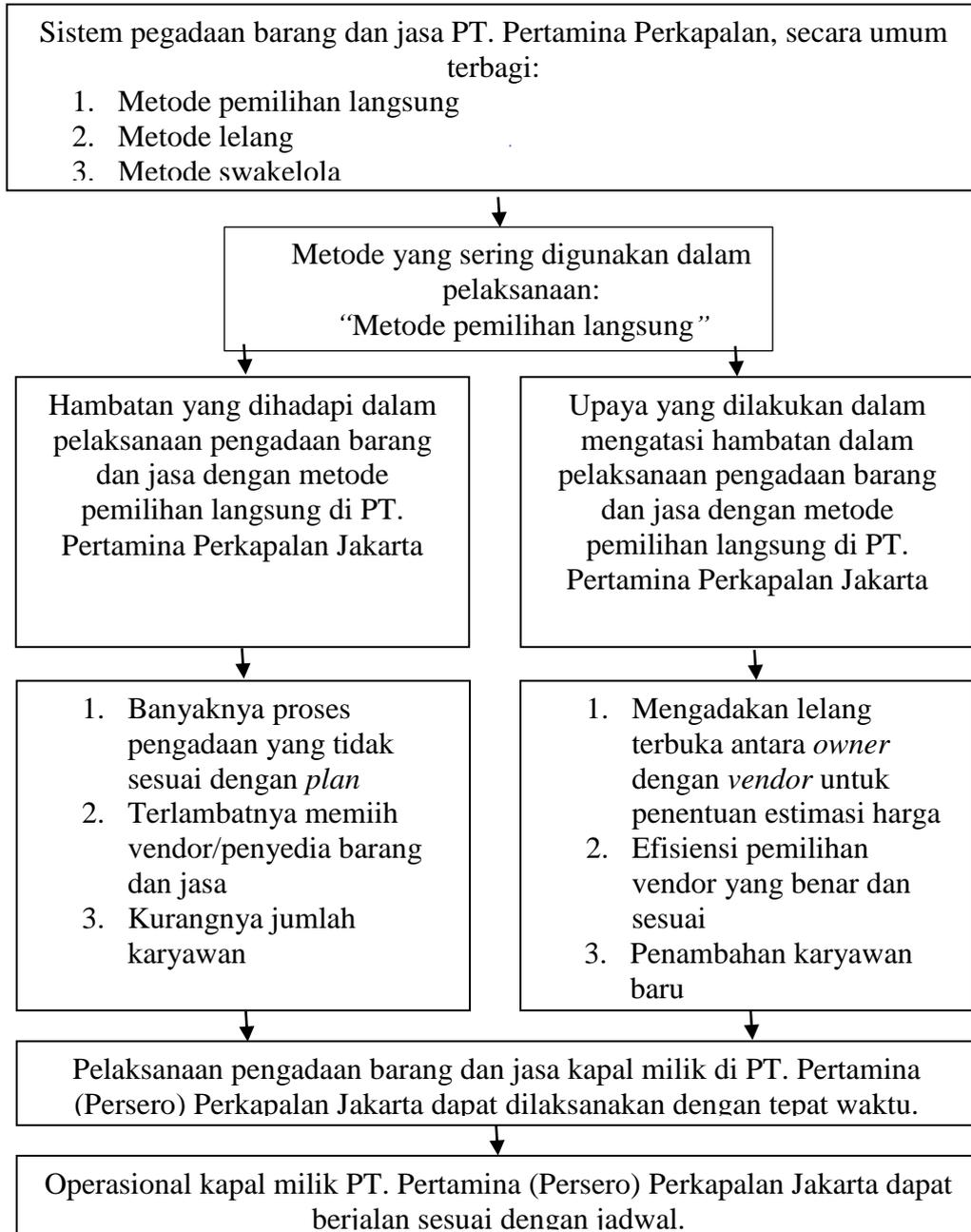
b. Jasa yang dibutuhkan

Jasa pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan barang. Agar dapat memahami perbedaan tersebut, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian.

Kotler dan Armstrong (1996:660) mendefinisikan jasa adalah tindakan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu badan usaha kepada pihak lain yang bersifat tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksinya dapat berhubungan dengan produk fisik ataupun tidak. Sedangkan Payne (2000:8) mengemukakan jasa adalah “suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan yang berhubungan denganya, melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainya dan memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Setiap pemberi jasa perlu mengetahui, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan memperhatikan karakteristik jasa.

B. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Dalam implementasi pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalann, terdapat 3 metode dalam pelaksanaannya, yaitu metode pemilihan langsung, metode lelang, dan metode swakelola. Metode yang sering digunakan adalah metode pemilihan langsung. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan antara lain banyaknya *action plan* yang bersifat *urgent*, terlambatnya memilih vendor/penyedia barang dan jasa, kurangnya jumlah karyawan, dan banyaknya temuan yang harus segera ditindak lanjuti. Untuk mengatasi hambatan tersebut PT. Pertamina harus melaksanakan upaya untuk mengatasinya dengan cara melakukan pemberitahuan kepada pihak kapal agar melakukan permintaan barang dengan tepat waktu dan efisien, harus efisien dalam pemilihan vendor, harus menambah karyawan, dan bertindak lebih cepat dalam menangani temuan-temuan. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan tepat waktu dan pengoperasian kapal milik PT. Pertamina Perkapalan berjalan sesuai dengan jadwal.

C. Definisi Operasional

1. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.
2. Pengadaan langsung yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan cara langsung menunjuk kepada penyedia barang/jasa tanpa adanya pelelangan/seleksi.
3. Metode lelang/pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.
4. Metode swakelola yaitu pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
5. Pengertian dari *spare part* adalah barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen. Ada beberapa komponen yang juga terdapat didalamnya beberapa komponen kecil, misalkan *engine* yang mempunyai komponen di dalamnya yaitu *fuel*

injection pump, water pump, starting motor, alternator, oil pump, compressor, power steering pump, turbocharger, dan lain-lain.

6. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.
7. Estimasi adalah suatu metode dimana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimator adalah nilai pendugaan/suatu data statistik, sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi suatu parameter.
8. *Owner's Estimate* (OE)/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga.
9. *Vendor* merupakan tempat yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi oleh pabrik yang dimilikinya, dan barang tersebut dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. Barang yang dibeli dari vendor dapat berupa bahan dasar, *spare part*, bahan penolong maupun barang setengah jadi.
10. *Superintendent Engineering* adalah orang yang mengelola dan mengarahkan suatu organisasi. Lebih mudahnya adalah orang yang bertanggung jawab pemegang proyek di lapangan. Levelnya berada di atas *supervisor, foreman*, dan mekanik. Secara garis struktural *superintendent engineering* tepat berada dibawah pemilik perusahaan.

11. Fungsi Pengadaan Pertamina adalah unit/satuan kerja dalam Pertamina yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses pengadaan (pemilihan penyedia barang/jasa) berdasarkan permintaan yang diajukan oleh fungsi pengguna, juga bertindak sebagai perencana dan penerima untuk pengadaan *material stock*.
12. Pas tahunan dan pas kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
13. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya.
14. LOA (*Length Over All*) adalah jarak membujur kapal dari titik terdepan hingga haluan kapal sampai ketitik terbelakang dari buritan kapal diukur sejajar lunas.
15. LBP (*Length Between Perpendicular*) adalah panjang kapal dihitung dari garis air sampai geladak lambung bebas/garis *deck*.
16. DPA (*Disgnated Person/s Ashore*) adalah jabatan yang harus ada di dalam sistim manajemen keselamatan sebuah perusahaan pengelola kapal, yang biasanya dijabat oleh seseorang atau lebih yang mampu menghubungkan perusahaan dengan mereka yang berada di kapal.
17. *Draft* kapal adalah jarak vertikal antara garis kapal sampai dengan lunas kapal, semakin banyak muatan kapal semakin dalam kapal masuk ke dalam air. *Draft* digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran

yang dilewati kapal serta kolam pelabuhan termasuk ke dalam air di dermaga.

18. Operator kapal adalah setiap orang yang berdasarkan atas hak tertentu dengan pemilik kapal untuk mengoperasikan kapal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Perkapalan, Jalan Yos Sudarso No. 32-34, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14320, telephone 021-4301088, 021-4301492. Penulis melakukan penelitian saat Prada (Praktek Darat) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 s/d 3 Juni 2016. Selain penulis mengadakan penelitian di lapangan, penulis juga melakukan penelitian studi kepustakaan yang khususnya terdapat di perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan perpustakaan daerah yang diharapkan mampu mendapatkan informasi yang mendukung dan berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penyusunan Skripsi ini.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sebuah penelitian harus berdasarkan pada material data yang akurat, agar hasil dari sebuah penelitian itu dapat dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun secara *riil* di lapangan. Dengan penelitian yang sesuai kenyataan dan keadaan yang sesungguhnya peneliti mencatat dan memaparkannya dalam suatu penulisan atau Skripsi. Sehingga hasil penelitian itu mempunyai nilai positif.

Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai (secara sistematis dan didukung oleh data) jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena (Afen Sena & Fairdian, 2014:24).

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat dinamis. Oleh karena itu Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola yang jelas. Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Penelitian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif atau pengukuran (V. Wiratna Sujarweni, 2015:21)

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori (V. Wiratna Sujarweni, 2015:22). Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Peneliti akan memberikan gambaran secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini dipilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpul data penelitian kualitatif diperoleh dari hasil, wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah (V. Wiratna Sujarweni, 2015:30). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara.

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat

dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya (V. Wiratna Sujarweni, 2015:31)

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Sebelum dilangsungkan wawancara yang mendalam, penulis menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Penulis harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki makna ganda ataupun yang bersifat ambigu.
- b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.
- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang kongkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman kongkrit responden.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian yang menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu (V. Wiratna Sujarweni, 2015:32)

Dalam penelitian ini, sesuai dengan obyek peneliti maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu semua teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mencatat langsung terhadap obyek yaitu dengan mengamati proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di PT. Pertamina Perkapalan (Persero) Jakarta.

3. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya serta data mengenai proses pengadaan barang dan jasa kapal yang didapatkan dari PT. Pertamina

(Persero) Perkapalan Jakarta. Hasil penelitian dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

4. Diskusi kelompok terarah

Metode pengumpulan data ini lewat diskusi terpusat, yaitu usaha mengungkap makna sebuah masalah dari suatu diskusi kelompok yang terpusat, hal ini untuk menghindari pemaknaan yang salah hanya oleh seorang peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mangkategorikan, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (V. Wiratna Sujarweni, 2015:33). Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Analisis data merupakan bagian paling penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informasi kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh responden.

Setelah penulis menulis hasil wawancara tersebut ke dalam transkrip, selanjutnya harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Penulis membuat data dengan cara membuat abstraksi yaitu mengambil dan mencatat informasi yang sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil PT. Pertamina (Persero) Perkapalan

Sebagai lokomotif perekonomian PT. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energy, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Dengan pengalaman lebih dari 59 (lima puluh sembilan) tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Upaya perbaikan dan *inovasi* sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina dalam menciptakan alternatif baru

dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

PT. Pertamina (Persero) Perkapalan dimulai dengan dibentuknya Divisi Perkapalan Pertamina pada tahun 1959. Dengan armada dua unit kapal tanker draft rendah berkapasitas 3.220 DWT yang didapatkan dengan skema *Bare Boat Hire Purchase* (BBHP) atau sewa-beli jangka panjang dari PT. Caltex. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 6 Desember 1975, Presiden Soeharto mengeluarkan Dekrit Nomor 44, yang mengatur lebih lanjut keberadaan Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi (Dit.P&T). Dalam kurun waktu inilah, Dit. P&T mencapai masa kejayaan dengan mengelola 133 unit kapal berbagai ukuran, dengan komposisi 77 unit tanker merupakan kapal milik sendiri, sedang kapal yang disewa dari pihak lain tidak lebih 60 unit. Selain itu Perkapalan juga mengelola 134 Pelabuhan Khusus (Pelsus) minyak dan gas, yang tersebar di seluruh Nusantara juga di bawah pengelolaan Dit. P&T serta seluruh sarana komunikasi elektronik kepunyaan Pertamina.

Pada tanggal 15 Maret 1990 dikeluarkan Dekrit Presiden No 11 yang diikuti oleh restrukturisasi organisasi dengan dibentuknya organisasi baru yakni Direktorat Perkapalan, Kebandaran dan Komunikasi (Dit. PKK). Keberadaan kapal milik pun kian menyusut yang semula dari 70-an unit menjadi 45 unit saja. Tahun 2000 merupakan awal perubahan

Pertamina. Dengan adanya Dekrit Presiden No 169/2000 tanggal 7 Desember 2000 mendorong lahirnya organisasi baru, PT. Pertamina (Persero) tepat pada tanggal 1 Januari 2001. Sejak saat itu mulailah transformasi secara menyeluruh di PT. Pertamina (Persero), tak terkecuali Perkapalan Pertamina. Melalui dekrit ini nama Direktorat Perkapalan, Kebandaran dan Komunikasi, diubah menjadi Perkapalan Pertamina pada tahun 2004.

Dengan tuntutan perkembangan ke depan yang menjadikan perusahaan terkemuka, berkembang dan disegani secara internasional sebagai visi perusahaan, perusahaan ini juga bertujuan untuk mengatur pelayanan logistik yang profesional dalam hal penyediaan minyak, gas bumi, petrokimia dan produk kilang yang lainnya.

Dalam pengoperasian kapal tentunya akan menemui kerusakan kapal terutama pada *spare part* kapal dan juga akan membutuhkan jasa-jasa perbaikan/perawatan kapal. PT. Pertamina perkapalan sendiri terbagi dari beberapa divisi yang masing-masing divisi mempunyai fungsi yang berbeda. Pada saat Penulis melaksanakan Praktek Darat, Penulis berada pada fungsi divisi TF3. Salah satu fungsi dari TF3 adalah fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan di atas kapal milik PT. Pertamina Perkapalan. Dari sinilah Penulis mulai mendapatkan masalah

yang perlu dibahas dalam pengimplementasian pengadaan barang dan jasa kapal di PT. Pertamina Perkapalan.

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

PT. Pertamina Logistik mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

a. Visi dari PT Pertamina

” Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”

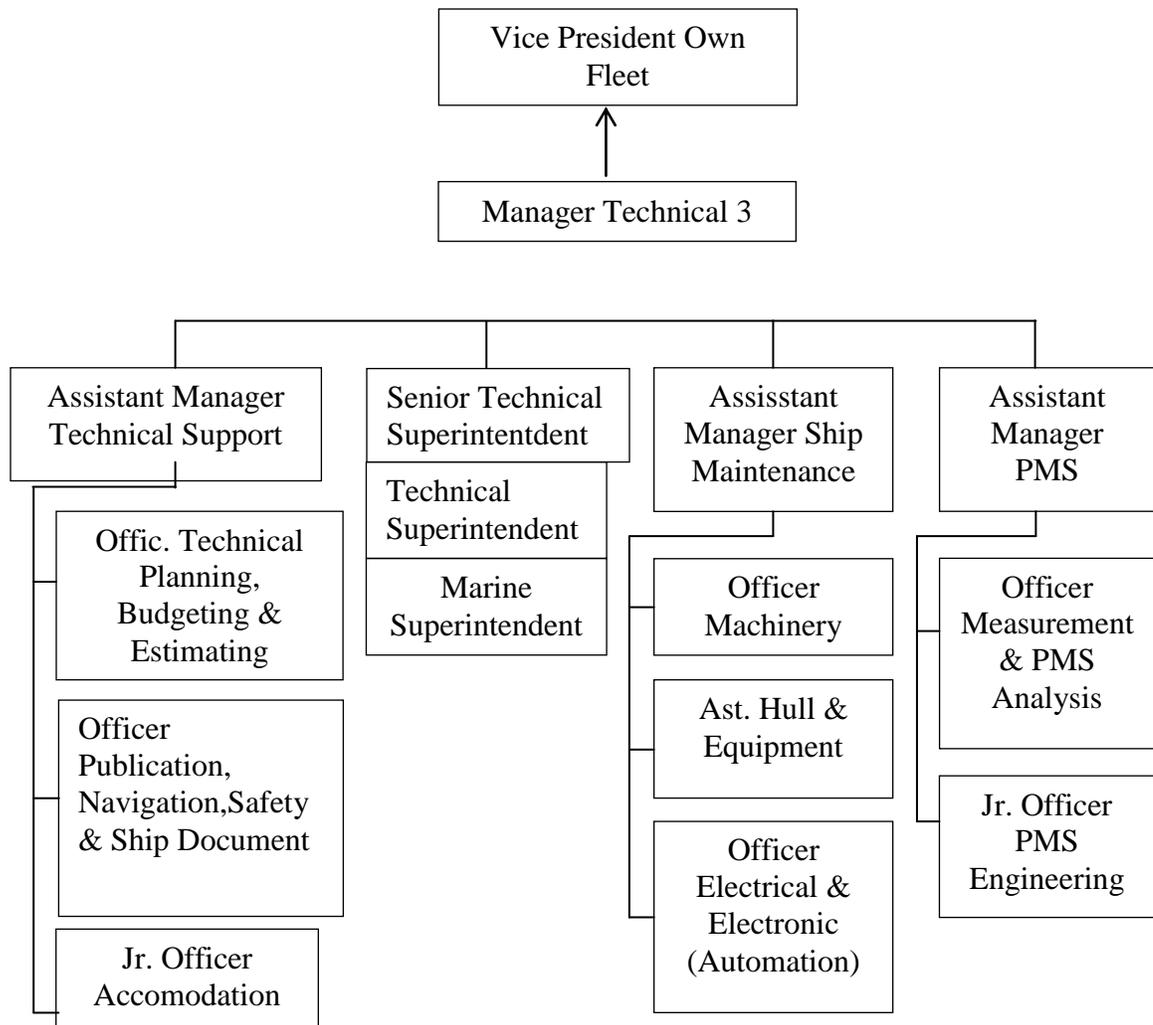
Untuk mewujudkan visi perseroan sebagai perusahaan kelas dunia, maka Perseroan sebagai perusahaan milik negara turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu energi baru dan terbarukan, minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu energi baru dan terbarukan, minyak dan gas bumi tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

b. Misi perusahaan adalah:

“Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat”.

Misi Perseroan menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*) secara terintegrasi.

3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1 Struktur organisasi perusahaan

(Sumber: PT. Pertamina Perkapalan Divisi TF3, 2016)

B. Analisis Hasil Penelitian

Dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa perusahaan mengharapkan semua kegiatan dalam perusahaan akan terlaksana dengan lancar. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan di atas kapal sesuai permintaan, tepat waktu, dan tepat guna. selain itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dijalankan diharapkan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan biaya hingga seminimal mungkin guna mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

Namun ternyata pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar prediksi seperti kegiatan pengadaan yang terjadi di PT. Pertamina Perkapalan, tempat Penulis melaksanakan Praktek Darat (Prada). Perusahaan sering mengalami masalah kompleks yang juga sering dialami oleh perusahaan yang menjalankan sistem pengadaan pada umumnya. Masalah tersebut diantaranya terlalu panjang proses pengadaan mulai dari permintaan sampai mendapatkannya barang tersebut, sering terjadinya kesalahpahaman antar divisi sehingga mengakibatkan kesalahan pengadaan barang, serta tingginya harga suatu barang atau jasa. Pada saat melakukan Prada Peneliti melakukan kegiatan dalam lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dilakukan ketika ada *action plan* yang

dibuat oleh kru kapal yang dikirim ke divisi pengadaan barang/jasa. Kemudian *action plan* tersebut diseleksi oleh *owner superintendent* sesuai dengan prioritas kebutuhan kapal. Setelah itu barulah diadakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan di PT. Pertamina Perkapalan.

Dalam melaksanakan penelitian di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta, Penulis memperoleh data hasil penelitian. Berdasarkan data yang ada, Penulis dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT. Perkapalan Jakarta dengan metode pemilihan langsung terdapat beberapa hal yang dapat ditangkap dan dijadikan bahan pembelajaran dalam dunia pengadaan barang/jasa. Hal tersebut akan Penulis jelaskan di Sub Bab Pembahasan.

Dalam pelaksanaannya PT. Pertamina Perkapalan harus sesuai dengan prinsip dan etika berdasarkan Keppres Nomor 54 tahun 2010. Hal ini yang menjadikan keberhasilan pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan. Selain itu PT. Pertamina Perkapalan harus mempunyai upaya khusus guna memperlancar proses pengadaan barang dan jasa sehingga kebutuhan diatas kapal dapat terpenuhi dan kegiatan operasional kapal dapat berlangsung dengan lancar.

C. Pembahasan

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa.

Pada saat Penulis melaksanakan penelitian di PT. Pertamina Perkapalan, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sebagian besar sudah mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- a. Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam keppres no 54 tahun 2010, Dalam pelaksanaannya di PT. Pertamina sebagian sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

- 1) Efisien, PT. Pertamina Perkapalan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa telah menggunakan dana dan daya dengan minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku

cadang, umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah-langkah yang dilakukan PT. Pertamina Perkapalan agar pengadaan barang/jasa efisien adalah:

- a) Penilaian kebutuhan, perusahaan selalu mementingkan apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan atau tidak.
 - b) Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu. PT. Pertamina perkapalan biasanya menggunakan metode pemilihan langsung.
 - c) PT. Pertamina Perkapalan selalu melakukan survei harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
 - d) Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik.
- 2) Efektif, proses pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan sudah sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Manfaat yang sebesar-besarnya dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi

dengan barang/jasa lainnya dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

- 3) Transparan, dalam pemilihan *vendor* atau penyedia barang/jasa PT. Pertamina Perkapalan bersifat transparan yaitu dengan cara pengumuman yang luas dan terbuka, memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran kepada pihak penyedia barang/jasa, menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi bagi *vendor*, memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
- 4) Bersaing, dalam pengadaan barang dan jasa, calon *vendor* PT. Pertamina Perkapalan harus melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada *intervensi* yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Persyaratan yang diberlakukan dalam pengadaan di PT. Pertamina Perkapalan agar tercipta persaingan yang sehat yaitu dengan cara.

Pengadaan barang dan jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta, kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk

memenangkan persaingan, dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat, pengelola pengadaan barang/jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat, dihindarkan terjadinya *conflict of interest*, dan ditegakkannya prinsip *non diskriminatif* secara ketat.

- 5) Adil/tidak diskriminatif, PT. Pertamina Perkapalan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaannya PT. Pertamina Perkapalan selalu memperhatikan hal-hal penting supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif yaitu:

- a) memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak
- b) menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa.
- c) pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan. Dalam pelaksanaannya masih banyak pihak penyedia barang/jasa yang berusaha memberi hadiah diluar

perjanjian, Sehingga PT. Pertamina Perkapalan bertindak tegas kepada para pihak penyedia barang/jasa yang melakukan hal tersebut.

- d) informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.
 - e) para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi)
 - f) adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
- 6) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga pengadaan barang/jasa akuntabel adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, dan adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

b. Etika pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan dilaksanakan berdasarkan etika-etika pengadaan yang dipraktekkan

secara nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

- 1) semua karyawan/staff harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan untuk tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Para karyawan/staff di divisi TF3 dalam melaksanakan tugasnya banyak yang merangkap kerja. Seperti contohnya seorang *owner*, selain menjadi penanggung jawab dari pengoperasian sebuah kapal, *owner* PT. Pertamina Perkapalan juga merangkap tugas sebagai pengecek barang yang seharusnya dilaksanakan oleh *surveyor*.
- 2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- 3) semua karyawan/staff harus bisa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.

- 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - 6) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - 8) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung guna memenuhi kebutuhan di atas kapal di PT. Pertamina Perkapalan.
- a. Berdasarkan pengamatan Penulis selama melaksanakan Praktek Darat di PT. Pertamina Perkapalan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara umum yang diterapkan di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta yaitu:
 - 1) Tahapan Perencanaan

PT. Pertamina Perkapalan menggunakan tahapan perencanaan penyusunan rencana tahunan pengadaan disinergikan dengan:

- a) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- b) Kontrak barang/jasa yang masa berlakunya akan segera berakhir, sehingga dapat mengantisipasi bila ada perubahan lingkup pekerjaan dan memerlukan perubahan kontrak.
- c) Rencana pembangunan proyek baru/pengadaan yang bersifat kompleks.
- d) Mengidentifikasi secara rutin semua kebutuhan pengadaan untuk menunjang jalannya operasional di tahun yang akan datang, misal perawatan asset, sewa jasa, jasa konsultan, pembelian barang perkantoran.
- e) Mengidentifikasi kategori risiko HSE (Health, Safety, Environment) terhadap setiap pengadaan barang/jasa.
- f) Mengidentifikasi risiko pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan pelaksanaan berdasarkan masukan dari fungsi manajemen risiko (bila diperlukan).

Rencana tahunan pengadaan barang/jasa dibuat bersamaan dengan periode usulan anggaran untuk diserahkan ke fungsi pengadaan dan dapat direvisi secara periodik. Selanjutnya fungsi pengadaan melakukan kompilasi data perencanaan pengadaan dan

melakukan analisa kebutuhan, analisa pasar, membuat strategi pengadaan dan seleksi penyedia barang/jasa serta menentukan jenis kontrak.

2) Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahapan yang paling krusial dan perlu memperhatikan tatakelola waktu. Pada tahapan ini, PT. Pertamina Perkapalan di divisi TF3/divisi pengadaan barang/jasa membuat ruang lingkup pekerjaan dan estimasi nilai pengadaan, penentuan kriteria evaluasi seleksi, penentuan strategi pengadaan dan jadwal pelaksanaan yang paling efisien dan efektif bagi Pertamina. Pada tahapan ini, sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai fungsi terkait (*Cross Functional Team*), untuk menyusun kajian persiapan pengadaan barang/jasa.

Strategi pengadaan barang/jasa sebisa mungkin dibuat untuk meningkatkan daya tawar Pertamina, menyederhanakan proses pengadaan dan penggunaan kontrak jangka panjang, memanfaatkan momentum bisnis sehingga meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

3) Tahapan Seleksi/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

PT. Pertamina Perkapalan sangat berhati-hati dalam melaksanakan proses evaluasi prakualifikasi, administrasi, teknis, HSE dan komersial, sehingga pada akhirnya Pertamina dapat

memberikan kontrak kepada penyedia barang/jasa yang mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas yang diinginkan, jadwal kebutuhan yang direncanakan, aspek HSE yang disyaratkan dan biaya yang terbaik bagi Pertamina.

Tahapan tersebut di atas dilanjutkan dengan pengawasan administrasi kontrak, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, realisasi biaya kontrak dan kinerja penyedia barang/jasa, serta pembinaan terhadap penyedia barang/jasa (*Supplier Relationship Management*). Sedapat mungkin menghindari terjadinya penambahan lingkup kerja.

4) Berdasarkan pengamatan dan data yang didapatkan Penulis saat melaksanakan Praktek Darat (Prada) di PT. Pertamina Perkapalan, proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung adalah sebagai berikut:

a) Objek pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan dengan metode pemilihan langsung.

Proses pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan dengan metode pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk berbagai pekerjaan sebagai berikut:

i) Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan

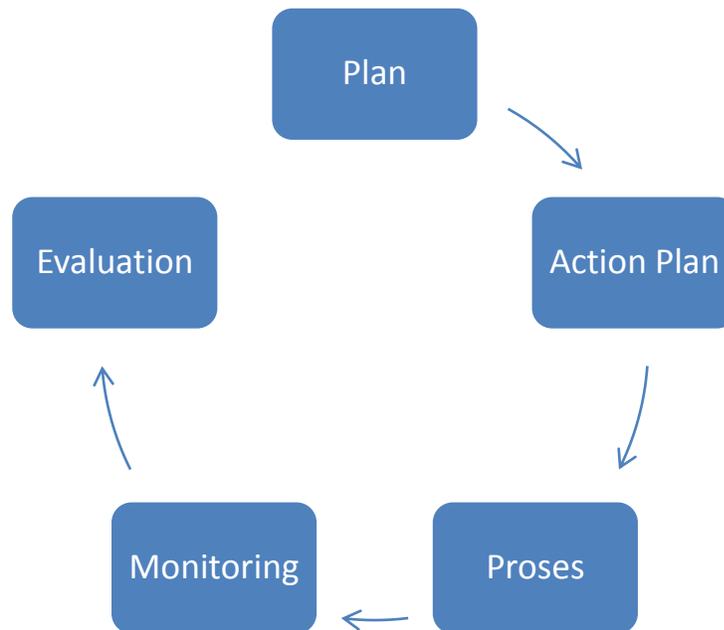
penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas.

- ii) Pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersifat kompleks.
 - iii) Pengadaan jasa konstruksi yang berskala kecil dengan ketentuan untuk kepentingan pelayanan umum, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dan dilaksanakan oleh penyedia jasa orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil.
 - iv) Pengadaan jasa konsultan dan jasa lainnya.
 - v) Pengadaan barang.
 - vi) Pengadaan barang/jasa terkait *approved brand* dalam rangka standarisasi.
- b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan

PT. Pertamina Perkapalan dalam kinerjanya terbagi menjadi banyak divisi yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Dalam melaksanakan penelitian, Penulis melaksanakan praktek darat di divisi TF3 (fungsi pengelola kapal milik), di bagian *Technical Support* (TS). Fungsi TS adalah fungsi yang menindaklanjuti proses pengadaan barang dan jasa. Fungsi inilah yang melaksanakan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung.

- c. Proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan.

Alur pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta:



Gambar 4.2. Alur pengadaan barang dan jasa

(Sumber: PT. Pertamina Perkapalan Divisi TF3, 2016)

Idealnya alur pengadaan barang dan jasa ialah sesuai grafik di atas, dimana diawali dengan suatu perencanaan baik oleh kapal maupun *shore base*. Lalu dilanjutkan dengan *action plan* yang dibuat oleh kru kapal yang dikirim ke divisi pengadaan barang/jasa. Kemudian *action plan* tersebut di seleksi oleh *Owner Superintendent* sesuai dengan prioritas kebutuhan kapal. Setelah itu

barulah diadakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan di PT. Pertamina Perkapalan, sampai mendapatkan barang yang dibutuhkan dan dikirim ke kapal sesuai dengan permintaan *action plan*.

Plan merupakan rencana kerja kapal baik pengadaan *spare part*/material maupun rencana jasa yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. *Plan* ini dapat tertuang di sistem PMS (*Plan Maintenance System*) maupun tertuang dalam rencana kerja. Namun pada kondisi actualnya hal ini sulit untuk dipenuhi, sehingga selama ini *action plan* berdasarkan dari dampak/gejala ketidaknormalan yang timbul diatas kapal pada saat beroperasi.

Action plan atau dalam arti lain yaitu rencana aksi atau tindakan adalah rencana rinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran. Namun dalam pelaksanaannya banyak pekerjaan yang dilaksanakan di luar *plan*. Hal ini dikarenakan terlalu banyak suatu pekerjaan yang harus disegerakan atau bersifat *urgent* yang di luar perkiraan atau *plan* tersebut. Sehingga perusahaan melaksanakan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan *plan* yang disiapkan karena harus mengerjakan suatu pekerjaan yang bersifat lebih penting.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan dilakukan dengan cara:

- 1) Fungsi pengadaan harus mengundang sekurang-kurangnya 5 (lima) calon penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem/aplikasi *bidder list* (memiliki surat keterangan terdaftar) dan/atau dimungkinkan mengundang penyedia barang/jasa yang belum terdaftar sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan CSMS (Contractor Safety Management System) yang telah ditentukan, serta dilengkapi dengan justifikasi yang berisikan informasi mengenai reputasi/kinerja sebelumnya yang diketahui. Bila memungkinkan diupayakan mengundang sebanyak-banyaknya jumlah penyedia barang/jasa.

Dalam pelaksanaan dilapangan dalam kondisi *urgent*, biasanya divisi TF3 langsung memilih *vendor*/penyedia barang/jasa tanpa mengundang kurang lebih 5 penyedia barang/jasa. Hal ini bisa dilakukan karena keadaan yang lebih penting atau yang disebut *urgent*. Demi kelancaran pengoperasian kapal dan meminimalisir pengeluaran yang banyak dari anggaran perusahaan. Karena jika tidak segera

dipenuhi kebutuhannya kerugian yang terjadi akan lebih besar.

- 2) Bila menggunakan *aplikasi e-procurement*, mengundang semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam aplikasi *e-procurement* sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi CSMS dan kinerja yang telah ditentukan.
- 3) Pemilihan langsung dapat tetap dilaksanakan apabila diyakini/diketahui secara luas bahwa penyedia barang/jasa yang tersedia untuk diundang kurang dari 5 (lima).
- 4) Khusus untuk sinergi Pertamina *Incorporated* dan/atau sinergi BUMN, proses pemilihan langsung dapat diikuti oleh anak perusahaan/perusahaan terafiliasi Pertamina dan/atau BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN yang sesuai dengan bidangnya.

Secara terperinci dalam pelaksanaannya urutan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung di PT. Pertamina Perkapalan sebagai berikut:

- 1) *Plan repair* (rencana kerja dan anggaran perusahaan) atau *Unplan repair (breakdown, emergency)*.
- 2) *Action plan (spare part)*/lembar perbaikan
- 3) Membuat justifikasi pemilihan langsung dengan dilengkapi dokumen penunjang.

- 4) Membuat justifikasi penunjukan vendor
- 5) Membuat undangan pengadaan barang dan jasa ke vendor
- 6) Menerima penawaran dari vendor yang diundang dan dilakukan evaluasi
- 7) Membuat *owner estimasi*
- 8) Melakukan negosiasi
- 9) *Vendor* memberikan penegasan harga
- 10) Pembuatan PR (*Purchase Request*)
- 11) Penerbitan SPMP (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) sebagai dasar *vendor* untuk mulai pekerjaan
- 12) Mengirim e mail ke fungsi *procurement* untuk menerbitkan RFQ (*Request for Quotation*)/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) untuk masing-masing penyedia barang/jasa yang lulus dan melakukan pengundangan untuk mengambil dokumen pengadaan dan PO (*Purchase Order*)
- 13) Menerbitkan PO (*Purchase Order*) sebagai dasar membuat kontrak pekerjaan
- 14) Apabila pekerjaan telah selesai dibuat berita acara serah terima pekerjaan
- 15) Pembuatan GR (*Goods Receipt*)/SA (*Service Acceptance*)
- 16) Penagihan keuangan

3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina Perkapalan dalam memperlancar proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta melakukan upaya untuk memperlancar proses pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan di atas kapal dan untuk memperlancar pengoperasian kapal.

Beberapa upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan pemilihan *vendor*, PT. Pertamina Perkapalan mengharuskan semua *vendor* yang terdaftar memiliki SKT. Hal ini bertujuan apabila suatu pekerjaan tidak selesai sesuai perjanjian/kontrak kerja, maka pihak vendor yang sudah memiliki SKT dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut dan dapat diklaim menurut ketentuan dan perjanjian kontrak kerjanya.
- b. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa PT. Pertamina Perkapalan harus mempunyai *Estimator* yang handal. Kehandalan

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pekerjaannya yang nyaris tepat dalam memperkirakan suatu harga barang atau biaya suatu pekerjaan.

- c. PT. Pertamina Perkapalan menerapkan dengan tegas Keppres Nomor 54 tahun 2010. Sebagai contoh pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa *vendor* tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian dan kontrak kerja maka PT. Pertamina Perkapalan dengan tegas memutuskan hubungan kerja dengan *vendor* tersebut. Selain itu PT. Pertamina Perkapalan tidak akan memakai jasa *vendor* tersebut dalam suatu pekerjaan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktek Darat di PT. Pertamina Perkapalan, yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang terdapat beberapa kendala dan penyebab dari permasalahan tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Tahapan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung berupa *plan* yang artinya rencana tahunan yang biasanya dibuat oleh *owner* ataupun pihak kapal, berikut *action plan* yang merupakan tindakan dari suatu *plan* tersebut, serta monitoring berupa pengawasan langsung dari *owner*, dan evaluasi dari suatu pengadaan barang dan jasa tersebut yang harus dilaksanakan oleh pihak *owner*. Namun dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan *plan*.
2. Kurang koordinasi antara *estimator* dengan penyedia barang/jasa, dan dalam pelaksanaan pengadaan masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan hambatan untuk proses tersebut.
3. Kurangnya jumlah pegawai/staff divisi TF3 yang mengakibatkan adanya rangkap kerja sehingga proses pengadaan tersebut tidak berjalan sesuai

dengan yang diharapkan baik dari kelengkapan administrasi maupun dari realisasi anggaran yang tidak terserap sesuai *plan* yang direncanakan.

B. Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan dapat memperlancar proses pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan.

Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kinerja penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan *plan*, PT. Pertamina Perkapalan harus mengadakan lelang terbuka antara *vendor*/penyedia barang yang membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, untuk penentuan estimasi suatu harga barang atau pekerjaan.
2. Upaya yang harus dilakukan pada fungsi pengadaan di PT. Pertamina Perkapalan guna memperlancar proses pengadaan barang dan jasa yaitu pemilihan *vendor* yang selektif, adanya estimator yang handal, dan penerapan Keppres Nomor 54 tahun 2010 dengan tegas.
3. Pada divisi pengadaan adanya rangkap kerja pada proses pengadaan barang dan jasa mengindikasikan kurangnya staff/karyawan yang bekerja pada PT. Pertamina Perkapalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus diadakan penambahan staff/pegawai baru untuk divisi pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- IMO Model Course 2.01., 2014, *Managemen Perawatan dan Perbaikan Kapal*, Penerbit Buku Maritim, Semarang.
- Indrajit, R. E., dan Djokopranoto, 2003, *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, Grasindo, Yogyakarta.
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Terjemahan Rick Ismanto), Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Menteri Perhubungan, 2012, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal*.
- Musanto, T., 2004, *Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus pada CV. Sarana Media Advertising Surabaya*, Jurnal Manajemen & Kewirausahawan Vol.6 No.2: 123-136.
- Nurdin dan Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Payne, 2000, *Pemasaran Jasa - The Essence of Service Marketing*, Terjemahan Fandy Tjiptono, Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2012, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Fokus Media, Bandung.
- Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Sena, A., dan Fairdian, 2014, *Penelitian Ilmiah*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta.
- Sujarweni, V.W., 2015, *Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Bandung.
- Sutedi, A., 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Brang dan Jasa – Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 08 Februari 1995
NIT : 50135078.K
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Samong Rt.03/Rw.06
Kec. Ulujami, Kab. Pemalang



Nama Orang Tua

Ayah : Caryani

Ibu : Musriyah

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SDN 03 SAMONG (2001-2007)
2. SLTP : SMP N 01 ULUJAMI (2007-2010)
3. SMU : SMA N 01 COMAL (2010-2013)
4. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG (2013-2017)

Pengalaman Praktek Darat :

1. PT. Pertamina Perkapalan, Jakarta (Jalan Yos Sudarso No. 32-34, Tanjung Priok, Jakarta Utara)

01 Agustus 2015 – 03 Juni 2016

HASIL WAWANCARA

Daftar pertanyaan hasil wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak internal perusahaan:

Nama : Bapak. Risky Pradikta

Jabatan : *Officer Contract & Administration/Owner Estimation*

Tempat : Divisi *technical fleet* III, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta

Waktu : 09.00 – 10.00, Jumat, 10 Maret 2017

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:

1. Berapa lama anda bekerja di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta?

Jawab:

Saya bekerja di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta sudah hampir 10 tahun.

2. Secara garis besar, bagaimanakah proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung? Dan pihak siapa saja yang dilibatkan?

Jawab:

Bisa anda lihat dipedoman pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode pemilihan langsung.

Seluruh pihak yang berwenang

3. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi saat melakukan proses penentuan harga *spare part* atau sebuah jasa perbaikan kapal?

Jawab:

Dalam penentuan atau dalam proses estimasi harga *spare part* saya sebagai *estimator* terkadang merasa kuwalahan walaupun sudah memakai acuan atau referensi nilai harga *spare part* yang dibutuhkan karena jumlah *spare part* yang dibutuhkan dan waktu yang diberikan sangat pendek, sehingga saya menyadari terkadang saya melakukan pekerjaan saya sendiri kurang optimal. Kemudian pada saat negosiasi harga dengan *vendor*/penyedia barang/jasa pada kenyataannya tidak semua penyedia *spare part* mempunyai COM (*Certificate Of Marker*), maksudnya *spare part* yang mempunyai COM (*Certificate Of Marker*) adalah *spare part* yang kualitasnya benar-benar bagus dan terjamin karena diterbitkan langsung oleh pabrik yang memproduksi *spare part* tersebut. Namun ada juga penyedia *spare part* yang tidak bisa menunjukkan COM (*Certificate Of Marker*) dan hanya mempunyai COO (*Certificate Of Origin*) maksudnya *spare part* yang mempunyai COO (*Certificate Of Origin*) adalah *spare part* yang kualitasnya dibawah dari kualitas *spare part* yang mempunyai COM (*Certificate Of Marker*), karena *spare part* tersebut tidak diproduksi langsung oleh pabrik yang memang benar-benar

memproduksi *spare part* tersebut. *Spare part* yang mempunyai COM (*Certificate Of Marker*) akan mempunyai harga beli yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *spare part* yang hanya mempunyai COO (*Certificate Of Origin*). Selain itu, jumlah karyawan/staff di divisi *Technical Fleet 3* juga terbatas, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/*spare part* ataupun jasa ada yang merangkap kerja. Akibatnya berdampak buruk untuk kapal karena terlambatnya pengiriman barang dan tidak tepat waktu saat melaksanakan perbaikan saat kerusakan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran pengoperasian sebuah kapal.

4. Dapatkah saya (peneliti) meminta beberapa dokumen tersebut beserta dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan proses penentuan pengadaan barang dan jasa?

Boleh, silahkan anda menghubungi bagian administrasi.

Daftar pertanyaan hasil wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak *vendor*/penyedia barang dan jasa perusahaan:

Nama : Bapak. Mahpud Saputra

Jabatan : Direktur CV. Patma Pancer

Tempat : Divisi *Technical Fleet 3*, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta

Waktu : 09.00 – 10.00, Jumat, 10 Maret 2017

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:

1. Berapa lama anda bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta?

Jawab:

Sudah sekitar 25 th

2. Perusahaan anda merupakan perusahaan apa? Jasa, dagang ataukah manufaktur dan bergerak dalam bidang apa? Serta bisa dijelaskan produk apa yang dihasilkan di perusahaan anda?

Jawab:

Perusahaan saya PT. Patma Pancer merupakan perusahaan yang bekerja dalam sektor penyedia barang dan jasa.

3. Bagaimana proses/sistem permintaan dari PT. Pertamina Perkapalan Jakarta untuk perusahaan anda dalam pengadaan barang/jasa? Apakah sudah terstruktur atau belum? Jika belum mengapa?

Jawab:

Untuk prosesnya sesuai dengan permintaan PT. Pertamina Perkapalan Jakarta. Menurut saya sudah terstruktur namun prosesnya masih terlalu rumit.

4. Permasalahn-permasalahan apa saja yang anda alami saat mengurus proses permintaan suatu barang/jasa perbaikan kapal?

Jawab:

Minimnya waktu dalam pengurusan dokumen, sulitnya beberapa *owner superintendent* untuk ditemui, apalagi ketika dinas luar keluar kota sehingga saya harus menunggu sampai beliau kembali.

Saya sering mengalami kesulitan dalam menyediakan suatu permintaan perusahaan yang diperlukan terutama untuk *spare part* kapal yang usianya diatas 20 tahun, karena dari kebanyakan pabrik manufaktur rata-rata sudah tidak memproduksi jenis *spare part* yang sama, sehingga saya harus mencari dan bertanya ke semua koneksi kerja saya dan hal ini tentunya berdampak terhadap ketepatan waktu kerja antara saya dan PT. Pertamina Perkapalan Jakarta. Selain itu para estimator juga jarang ada waktu untuk bertemu dengan para penyedia barang/jasa.

5. Pihak siapa sajakah yang terlibat dalam pengurusan dokumen?

Jawab:

Seluruh karyawan divisi *Technical Tleet 3* terlibat.

6. Dari segi hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi harga dari suatu barang/jasa perbaikan kapal?

Jawab:

Jenis barang/*spare part*, bahan dan kualitas.

Daftar pertanyaan hasil wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak internal perusahaan:

Nama : Juniarni Rachman

Jabatan : Administrasi 1

Tempat : Divisi *Technical Fleet 3*, PT. Pertamina Perkapalan Jakarta

Waktu : 09.00 – 10.00, Jumat, 10 Maret 2017

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:

1. Berapa lama anda bekerja di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta?

Jawab:

Saya bekerja di PT. Pertamina Perkapalan Jakarta sejak tahun 2011 sampai saat ini.

2. Secara garis besar, bagaimanakah penataan urutan pengarsipan dokumen?

Jawab:

Pertama aplikasi permintaan didalam aplikasi permintaan terdapat *Owner Estimate*, berita acara, lampiran pendukung material, PR (*purchase request*), PO (*purchase order*), SA (*service acceptance*).

3. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi saat anda melakukan pengarsipan dokumen? Menurut anda bagaimana cara anda untuk mengatasinya?

Jawab:

Permasalahan arsip sering tercecer atau terselip jika banyak pekerjaan yang menumpuk terkadang kita kesulitan mencari waktu untuk membenahi arsip-arsip yang telah selesai (lengkap beserta lampirannya).

4. Dapatkah saya (peneliti) untuk mendokumentasikan gambar untuk penataan dokumen?

Jawab:

Secara pribadi hal tersebut wajar namun mengingat isi dari berkas-berkas tersebut terdapat nilai/nominal harga, hal ini tidaklah boleh hingga publik luar mengetahui karena itu termasuk rahasia perusahaan dan saya ikut bertanggung jawab jika sampai bocor.

